

Implementasi Kepemimpinan Berbasis Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Safardan. Ka Oihu¹, Junaid Gazalin², Ferdiyansyah³, Rismal Setiawan⁴, Silas Adian Sampe⁵

^{1,2,3,4,5}Muhammadiyah Buton

E-mail: fardanoihu8@gmail.com¹, junaidgazalin@gmail.com², Fhanferdiansyah@gmail.com³, rismalsaktiawan88@gmail.com⁴, abuhatimsilas@gmail.com⁵

Article History:

Received: 10 Februari 2025

Revised: 21 Maret 2025

Accepted: 27 Maret 2025

Keywords: Leadership, Pancasila, Regional Government, Governance, Transformation

Abstract: Local government leadership in Indonesia faces complex challenges in implementing Pancasila values as the basic philosophy of the nation and state. The era of globalization and socio-political transformation has created systemic pressure on the governance system, demanding adaptation of leadership philosophy that is able to respond to the dynamics of change while maintaining national identity. Pancasila is not just a historical document, but a living and sustainable ethical framework in the practice of regional government administration. This study aims to comprehensively analyze the implementation of Pancasila values in local government leadership. Specifically, the study focuses on identifying the practice of implementing Pancasila values in regional leadership, exploring supporting and inhibiting factors for the internalization of national values, analyzing the impact of implementing Pancasila values on the quality of governance, and formulating leadership development strategies based on the noble values of Pancasila. The research methodology uses a qualitative approach with a descriptive case study method. The location of the study was determined in the Central Java Provincial Government, considering the complexity of government characteristics and the representativeness of the dynamics of regional leadership in Indonesia. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with key informants, participatory observation, and analysis of official government documents. The selection of informants was carried out purposively, including regional heads, regional secretaries, heads of related agencies, community leaders, and academics who have experience and capacity in the field of government leadership. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, including the stages of data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. The

results of the study indicate that the implementation of Pancasila values in regional government leadership still faces complex structural and cultural challenges. Despite various positive efforts, the internalization of Pancasila values is often hampered by rigid bureaucratic practices, pragmatic interests, and limited in-depth understanding of the philosophical substance of Pancasila. The conclusion of the study confirms that the implementation of Pancasila values in regional leadership is a dynamic process that requires total commitment from all components of government and society. Transformation cannot be done instantly, but through systemic, sustainable, and participatory efforts.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan transformasi sosial-politik telah membawa tantangan kompleks bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Dinamika global yang semakin interconnected menuntut pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berkarakter. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia menjadi sangat relevan untuk mengarahkan praktik kepemimpinan pemerintahan yang bermartabat dan berkeadilan.(Dr. Baharuddin Thahir, M.Si, 2019)

Kepemimpinan berbasis Pancasila sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Salah satu contoh nyata adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang dinilai mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Gaya kepemimpinan beliau yang visioner, pluralis, dan mampu merangkul berbagai kalangan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang menjadi ciri khas kepemimpinan Presiden Jokowi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Dengan menerapkan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat, menjaga persatuan, dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia

Permasalahan fragmentasi sosial, korupsi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi indikasi lemahnya implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai kasus penyimpangan kewenangan, ketidakadilan struktural, dan rendahnya empati pemimpin pemerintahan menunjukkan urgensi penguatan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai fundamental bangsa.(DR. H. Dahyar Daraba, M.Si, 2019)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan efektif sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan. Kepemimpinan berbasis Pancasila diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang adil, bijaksana, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemimpin diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah, merancang kebijakan yang merata, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat, harus diterapkan secara nyata dalam kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kepemimpinan berbasis Pancasila dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah juga akan berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, meskipun nilai Pancasila menjadi landasan penting, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Pemimpin daerah perlu memiliki komitmen yang kuat, kemampuan manajerial, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan nilai Pancasila dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. (Gayatri, 2023)

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan daerah menjadi keniscayaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bermartabat. Hal ini tidak sekadar retorika politis, melainkan kebutuhan sistemik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. (Purwanto, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengeksplorasi implikasi praktis dari pendekatan kepemimpinan berbasis nilai-nilai luhur tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melalui tinjauan literatur. (Afiyanti, 2014). Melalui penelitian kualitatif memungkinkan pengembangan pemahaman teoretis yang lebih kaya tentang bagaimana implementasi kepemimpinan berbasis nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mungkin belum tercakup dalam teori-teori yang ada.

M. Hatta sebagai salah satu Bapak Pendiri Negara Indonesia, dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hatta berpendapat bahwa kepemimpinan yang baik harus mampu mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat yang tercermin dalam sila kelima Pancasila. Menurutnya, pemimpin daerah harus bekerja berdasarkan prinsip "gotong royong" untuk mencapai tujuan bersama dan tidak hanya mengejar kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arus globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah menyebabkan pengaruh pada pergeseran nilai-nilai sosial, budaya dan moral masyarakat yang dapat berdampak pada nilai karakter budaya bangsa. Falsafah hidup bangsa dalam nilai-nilai Pancasila menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan dalam menghadapi fenomena globalisasi. Pancasila mampu memperkuat budaya asli Indonesia yang beragam untuk tetap bersatu dan bergotong royong dalam bertindak dan berperilaku. Globalisasi meleburkan batas antar negara. Dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sangat diperlukan Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai Pancasila seperti spiritual, humanisasi, nasionalis, demokratis dan keadilan sosial (social justice). (Gayatri, 2023)

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan pemerintah daerah merupakan proses kompleks yang melibatkan transformasi sikap, perilaku, dan kebijakan para pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya terlaksana

secara optimal dalam praktik kepemimpinan. Dimensi ketuhanan tercermin dari upaya pemimpin daerah dalam mengembangkan kebijakan yang menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Namun, masih terdapat praktik diskriminatif dan minimnya ruang dialog konstruktif antarumat beragama. Sikap toleransi membutuhkan pengembangan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Setiap pemimpin daerah seharusnya memaknai dan menerapkan sila-sila Pancasila sebagai berikut:

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Pemimpin daerah harus mampu mengedepankan moralitas dan etika dalam setiap pengambilan keputusan, menghormati keberagaman agama, dan menjamin kebebasan beribadah bagi masyarakatnya.....

Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Pemimpin harus memperhatikan hak asasi manusia, menjamin perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, dan menjaga martabat setiap individu.

Sila ketiga (Persatuan Indonesia): Pemimpin daerah perlu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, serta mencegah perpecahan yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Kepemimpinan yang berbasis musyawarah mufakat harus menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Pemimpin daerah harus memastikan kebijakan yang diterapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara merata, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Aspek kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dalam beberapa program perlindungan sosial, tetapi implementasinya masih parsial. Pelayanan publik kerap terkendala oleh birokrasi yang rumit dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya berorientasi pada martabat kemanusiaan (Lubis, n.d.). Nilai persatuan Indonesia diuji dalam konteks heterogenitas sosial-budaya. Meskipun terdapat upaya pengembangan program integrasi, masih terdapat potensi konflik horizontal yang memerlukan penanganan komprehensif melalui kepemimpinan yang inklusif.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kepemimpinan berbasis Pancasila di pemerintahan daerah adalah bagaimana menjaga agar pemerintahan tetap bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan keempat, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pemimpin daerah yang menerapkan prinsip Pancasila harus mampu menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, mengedepankan pelayanan publik yang efisien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem administrasi dan keuangan daerah yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan.

Prinsip demokrasi deliberatif dalam musyawarah menunjukkan perkembangan positif, dengan meningkatnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Namun, mekanisme musyawarah kerap didominasi oleh kepentingan elit dan belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat secara substantif. Keadilan sosial menghadapi tantangan struktural dalam distribusi sumber daya. Program pemberdayaan ekonomi dan jaminan kesejahteraan telah dilaksanakan, tetapi belum mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Penerapan nilai musyawarah untuk mufakat yang terdapat pada sila keempat Pancasila, menjadi salah satu hal yang penting dalam kepemimpinan berbasis nilai Pancasila. Pemimpin

daerah harus selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting, yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai kelompok kepentingan.

Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah cenderung lebih inklusif, adil, dan mencerminkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus membangun ruang dialog yang terbuka dan komunikatif dengan masyarakat, serta menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian lebih mendalam menunjukkan bahwa tantangan implementasi nilai Pancasila tidak sekadar persoalan teknis, melainkan fundamental. Menurut Mahfud MD (2017), transformasi kepemimpinan membutuhkan rekonstruksi sistemik yang melibatkan perubahan paradigma birokrasi. (Hastangka et al., 2019) menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintahan sebagai agen transformasi nilai-nilai Pancasila. Dinamika kepemimpinan daerah juga dipengaruhi oleh konteks sosial-politik yang kompleks. Tantangan globalisasi dan demokratisasi menuntut fleksibilitas kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan sambil mempertahankan jati diri bangsa. ("nal Education and development," 2018) menegaskan bahwa kepemimpinan kontemporer membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental.

Aspek kelembagaan turut berperan signifikan dalam implementasi nilai Pancasila. Struktur birokrasi yang rigid dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya responsif menjadi hambatan utama. (Sujatmiko, 2016) mengidentifikasi bahwa transformasi kelembagaan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak sekadar perubahan prosedural, melainkan rekonstruksi paradigma dan sistem nilai. Kompleksitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan pemerintah daerah menuntut pendekatan holistik. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan untuk mentransformasi nilai-nilai luhur tersebut menjadi praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan. Pendidikan karakter, rekonstruksi sistem, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas.

Transformasi kepemimpinan berbasis Pancasila membutuhkan pendekatan holistik. (Rahman et al., 2022) menekankan pentingnya rekonstruksi kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan karakter yang berkelanjutan. Tidak sekadar transfer pengetahuan, melainkan internalisasi nilai-nilai luhur dalam praktik kepemimpinan.

Kompleksitas implementasi Pancasila menuntut komitmen berkelanjutan. Setiap pemimpin daerah harus mampu mentransformasi nilai-nilai luhur tersebut menjadi praktik konkret dalam tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan pendekatan yang integratif, menyelaraskan tradisi kejuangan dengan tuntutan modernitas.

Tantangan utama terletak pada kapasitas pemimpin daerah dalam mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Pancasila tidak sekadar menjadi dokumen filosofis, melainkan kerangka etika yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Setiap dimensi kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk mentransformasikan prinsip-prinsip luhur tersebut ke dalam mekanisme tata kelola yang efektif.

Karakteristik kepemimpinan daerah yang ideal mensyaratkan kemampuan untuk mengintegrasikan keragaman perspektif dan kepentingan. Kompleksitas sosial-budaya Indonesia menuntut pemimpin yang mampu menciptakan ruang dialogis, mengelola perbedaan, dan membangun konsensus yang inklusif. Hal ini membutuhkan kearifan dalam membaca dinamika sosial dan kemampuan membangun jejaring kolaboratif.

KESIMPULAN

Menurut saya, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, penerapan kepemimpinan berbasis nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin daerah yang berpegang pada nilai Pancasila diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis, dengan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan pemerintah daerah merupakan perjalanan kompleks yang menuntut transformasi mendalam dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, masih terdapat kesenjangan signifikan antara cita-cita ideal dan praktik aktual.

Tantangan utama terletak pada kemampuan para pemimpin daerah untuk menterjemahkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan konkret. Keterbatasan pemahaman, struktur birokrasi yang rigid, dan kepentingan pragmatis kerap menjadi penghalang utama. Seringkali nilai-nilai Pancasila hanya dipahami secara superfisial, tanpa penghayatan mendalam terhadap substansi filosofisnya. Dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Tidak sekadar retorika politis, tetapi transformasi nyata dalam praktik kepemimpinan. Dibutuhkan komitmen yang konsisten dari seluruh lapisan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita luhur Pancasila.

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila bukan persoalan sederhana, melainkan upaya sistemik yang memerlukan rekonstruksi paradigma, peningkatan kapasitas, dan penguatan integritas pemimpin. Pendidikan karakter, penguatan kelembagaan, dan penciptaan ruang dialog yang inklusif menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepemimpinan yang berkarakter. Ke depan, dibutuhkan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek formalistik, tetapi juga penghayatan substantif nilai-nilai Pancasila. Setiap pemimpin daerah harus mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyanti, Y., 2014. Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. J. Keperawatan Indones. 9. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Baharuddin Thahir, 2019. Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia.
- Dahyar Daraba, 2019. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik.
- Gayatri, M., 2023. Kepemimpinan Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia 7.
- Hastangka, H., Armawi, A., Kaelan, K., 2019. Philosophical Review on The Meaning of The Term “Four Pillars” Of Mpr Ri. J. Hum. 31, 81. <https://doi.org/10.22146/jh.v31i1.34789>
- Lubis, M., N.D. Kapita Selekt Pendidikan Islam. Nal Education and Development, 2018.
- Purwanto, N.A., 2020. Peranan Kepala Sekolah Dan Guru Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Di Smk Dalam Mewujudkan Jati Diri Bangsa. Istor. J. Pendidik. Dan Ilmu Sej. 16. <https://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.32451>
- Rahman, S., Rahman, M.M., Miah, M., Begum, M.N., Sarmin, M., Mahfuz, M., Hossain, M.E., Rahman, M.Z., Chisti, M.J., Ahmed, T., Arifeen, S.E., Rahman, M., 2022. Covid-19 Reinfections Among Naturally Infected And Vaccinated Individuals. Sci. Rep. 12, 1438. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05325-5>

Sujatmiko, W., 2016. Penerapan Standar Keselamatan Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Di Indonesia. J. Permukim. 11, 116. <https://doi.org/10.31815/Jp.2016.11.116-127>